



## Walhi Kritisi Penanganan Masalah Sampah di DIJ

### TPA Piyungan Proses Penataan Pasca-Lebaran

**JOGJA** - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIJ mengkritisi permasalahan sampah saat momen libur Lebaran lalu. Data yang dihimpun dari berbagai kabupaten/kota terkait menurunnya jumlah sampah, disebut karena faktor eksternal yang situasional. Bukan karena keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah.



Staf Advokasi dan Kampanye Walhi Jogjakarta Egit Andre Kelana mengatakan, pada musim libur Lebaran 2026 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di beberapa kabupaten mengklaim timbulan sampah "terkendali" =

*Baca Walhi... Hal 7*



**PILAH SAMPAH:** Warga memilah sampah organik dan sampah anorganik sebelum dibakar di Kricak, Tegalrejo, Jogja, kemarin.

# Walhi Kritisi Penanganan Masalah Sampah di DIJ

Sambungan dari Hal 1

Misalnya di Kota Jogja yang mencatat kenaikan timbulan sampah 7 persen atau 40 ton per hari.

Kemudian di DLH Sleman yang kenaikannya tercatat 10-15 persen atau 60-90 ton per hari. "Secara keseluruhan, jumlah peningkatan timbulan sampah pada libur Lebaran tahun ini memang lebih sedikit daripada libur Lebaran 2025," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/4).

Ia mengajak masyarakat untuk membaca secara kritis. Angka penurunan tersebut bisa saja terjadi karena penurunan jumlah atau lama tinggal wisatawan. Hal itu dibuktikan dari menurunnya jumlah okupansi hotel dibandingkan tahun lalu.

"Dapat dikatakan situasi yang tampak 'terkendal' itu merupakan faktor eksternal yang situasional, bukan karena keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah," tegasnya.

Ia juga memaparkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025 yang menunjukkan sampah organik masih mendominasi komposisi sampah di DIJ.

Ada 41,23 persen sampah organik. "Memang ada penurunan sebesar 12,28 persen sejak 2021," imbuhnya.

Data kaitannya dengan sampah plastik, justru mengalami peningkatan sebesar 13 persen menjadi 25,77 persen. Sampah kertas/karton juga mengalami kenaikan 5,97 persen menjadi 14,53 persen. Ia menilai peningkatan yang signifikan pada sampah plastik dan kertas/karton mengindikasikan adanya kontribusi besar dari sektor industri, terutama yang berkaitan sektor pariwisata dalam konteks produksi sampah. Beban pengurangan sampah, lanjutnya, tidak sepatutnya dilimpahkan kepada masyarakat.

"Pemerintah harus tegas mengintervensi sektor industri yang selama ini tidak begitu banyak disentuh," tuturnya.

Ia meminta kebijakan pemerintah dari yang tadinya lebih banyak berfokus pada aspek penanganan sampah di hilir bisa merambah ke hulu. Kebijakan pengosongan depo, penambahan armada angkutan hingga jumlah personel kebersihan seringkali dilakukan.

Bahkan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang sudah *overload* dibuka kembali secara kondisional.

"Kebijakan pengurangan sampah yang ada sejauh ini hanya berupa surat edaran yang umumnya diterbitkan menjelang libur panjang," terangnya.

Menurutnya, pemerintah sejauh ini belum secara serius menyasar sektor produsen. Misalnya, pelaku bisnis hotel, restoran, pengelola pariwisata, atau industri lain, seperti industri kemasan. Sebab, sektor ini justru merupakan sumber tangan pertama yang memproduksi timbulan sampah, tetapi tidak banyak diintervensi secara serius oleh pemerintah.

"Hingga hari ini, Jogjakarta masih gagap dalam menghadapi permasalahan sampah pasca libur panjang," tandasnya.

Walhi Jogjakarta merekomendasikan tiga hal. Pertama, Pemprov DIJ perlu berkomitmen untuk menyusun kebijakan peta jalan pengurangan timbulan sampah dari hulu. Kedua, menyasar sektor industri dan produsen

sebagai sumber utama timbulan sampah. Ketiga, berkoordinasi antar-stakeholder dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkeadilan, dan berkelanjutan mulai dari hulu hingga hilir.

Terpisah, Kepala DLHKDIJ Kusno Wibowo mengatakan, Kota Jogja, Sleman, Bantul (Kartamantul) semuanya melakukan evakuasi sampah ke TPA Piyungan saat pra dan pasca Lebaran. Jumlah tonase sampah di Kota Jogja mencapai 695,738 ton, Sleman 377,350 ton, dan Bantul 294,310 ton. "Total ada 1.367,398 ton sampah dievakuasi di TPA Piyungan," ujarnya.

Secara umum, penanganan sampah di DIJ diklaim aman dan tidak ada evaluasi. Saat ini kondisi TPA Piyungan ditutup kembali untuk evakuasi reguler. Sebab, di sana sedang proses penataan dan dekomposisi agar ada tempat jika ada kedaruratan. "Untuk TPA sudah tidak menerima sampah reguler sejak 2024/2025. Dibuka untuk kedaruratan dan ini pun bila ada ruang yang memungkinkan," bebernyanya. (oso/laz/rg/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 20 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005